



Sulis Janji Lanjut Proyek Malioboro

■ **PLT Wali Kota Yogyakarta Janii Teruskan Program Pemerintah**

YOGYA, TRIBUN - PLT Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono mengatakan setelah resmi dilantik dirinya akan duduk bersama pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Yogyakarta dan melakukan dialog untuk menjabarkan roda pemerintahan di sana.

"Pada intinya, pemerintahan sekarang harus dipahami *temen-temen* PNS, kita ini bukan bagi penguasaan orang banyak, tapi bagi kepe-

Sulis Janji Lanjut Proyek Malioboro

● Sambungan Hal 13

tingan orang banyak. Mudah-mudahan paradigma tersebut bisa mengerti," terangnya, ketika ditemui usai pelantikan PLT Wali Kota Yogyakarta di Bangsal Kepatihan, Kamis (27/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda DIY tersebut menegaskan bahwa program sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya, akan terus berjalan. Contohnya adalah penataan Malioboro dan pembahasan Perda.

"Perencanaan Malioboro akan kami koordinasikan dengan Pemda DIY, agar berjalan dengan perencanaan yang ada. Sementara Perda kita akan lanjutkan pembahasan, sesuai dengan aturan kapan ditetapkan, dan sebagainya. Itu harus kita teruskan," beber Sulis.

Selain itu, terkait netralitas PNS pada saat Pilkada 2017 mendatang dia menegaskan PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta akan netral. Menurutnya, netralitas PNS merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam UU, PP, hingga Surat Edaran Gubernur.

"Adanya Plt juga untuk memastikan urusan pemerintahan tetap berjalan, dan menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat. Termasuk mengawal Pilwalkot. Biar mereka yang bertarung, tapi kita semua melatih diri kita untuk berdemokrasi secara baik," tuturnya.

Izin cuti

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyampaikan permohonan izinya sebagai

Wali Kota Yogyakarta dan juga Imam Priyono sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara terkait keikutsertaan keduanya dalam kontes Pilkada 2017.

"Dengan penuh kerendahan hati, perkenankan kami Haryadi Suyuti dan rekan kami Imam Priyono Dwi Putranto menyampaikan permohonan izin untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara," ucapnya.

Selain berpanjitan, HS, sapaan akrabnya juga memaparkan gambaran umum dari kondisi terkini Kota Yogyakarta, yang nantinya juga digunakan acuan PLT Wali Kota Yogyakarta. Sulistyono untuk melaksanakan tugasnya di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Satu di antaranya adalah prioritas penyelenggaraan pemerintahan.

"Pada tahun 2016 ditetapkan tujuh prioritas pembangunan yaitu sosial budaya, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, lingkungan hidup, dan kinerja aparatur," tuturnya.

Mulai Jumat hari ini (28/10), Kota Yogyakarta dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota. Sebab kepala daerah definitif, Haryadi Suyuti (HS) dan Imam Priyono (IP) mengajukan cuti kampanye hingga masa jabatan habis, yakni 20 Desember 2016.

Hati-hati di Medsos

Di hari terakhir ber Kantor, Plt Wali Kota Yogyakarta, IP meminta kepada PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta agar netral. Bahkan politisi PDI Perjuangan itu melarang tegas PNS mengunggah konten apapun ke media sosial yang berbau dukungan.

"Misalnya di Facebook mem-nulis minum kopi itu ber-

manfaat, atau minum kopi itu berbudaya. Bermaksud (bersama Imam & Achmad Fadli) itu mengarah ke saya, atau berbudaya yang mengarah ke Pak Haryadi. Tidak boleh," ucapnya, Kamis (27/10).

Dia menambahkan saat cuti kampanye istrinya, Sulistyani sudah diminta untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua PKK Kota Yogyakarta. Hal itu berdasar hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait cuti di luar tanggungan negara, belum lama ini.

"Ketika kepala daerah cuti, istri juga harus mundur dari jabatan yang didapat dari jabatan suami. Itu sesuai konsultasi dengan Kemendagri," ujar IP.

Terancam sanksi

Senada, HS juga meminta PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta fokus melayani masyarakat, dan tidak mendukung satu calon yang maju di Pilwalkot. Hal tersebut harus dilakukan karena sesuai aturan yang berlaku, PNS yang tak netral mendapat sanksi.

"Saya minta para PNS bisa berdiri tegak menjaga aturan, termasuk netral di Pilwalkot. Fokus saja pada ketugasannya untuk melayani warga," ucapnya.

HS pun mengatakan di hari terakhir ber Kantor, dia telah menyiapkan memori pertanggungjawaban yang akan disampaikan ke Plt Wali Kota Yogyakarta. Memo tersebut untuk mempermudah Plt Wali Kota dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkup Pemkot.

"Seperti pembahasan APBD 2017 dan kelembagaan organisasi daerah. Tentu Plt perlu diberi bekal. Bekal itu saya tuangkan dalam memori pertanggungjawaban," ujarnya. (kur/inf)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 19 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005